

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berakhirnya Perang Dunia Kedua dan setelah Jepang, Eropa, Inggris yang telah kehilangan kekuatannya dalam peran kapitalis global, secara tidak langsung Amerika Serikat telah menduduki atau mendominasi perekonomian pasar dunia. Hal ini dilakukan dengan pengambilan kebijakan yang berdampak pada sistem global, yaitu dengan adanya Organisasi-Organisasi Internasional yang telah diperbarui, yaitu: WTO, IMF dan Bank Dunia. Oleh karena itu, Amerika Serikat dijuluki sebagai negara hegemoni di dunia ini (Sorensen, 2013, hal. 317).

Hal ini ditambah dengan adanya dua kekuatan yang dimiliki oleh Amerika Serikat, yaitu *hard power* dan *soft power*. Pertama, *hard power* yaitu berupa kekuatan militer Amerika Serikat yang kuat hingga saat ini. Kedua, *soft power*, yaitu berupa ekonomi, diplomasi, kompetisi serta pembaharuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang bersifat universal. Oleh karena itu, Amerika Serikat mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam menjalankan stabilitas perekonomian dunia (Djelantik, 2008, hal. 228-238). Hal ini dikarenakan, Amerika Serikat mempunyai kekuatan serta kontrol terhadap empat komponen dalam sumber daya perekonomian dunia, yaitu: pasar, modal, bahan mentah serta keuntungan kompetitif yang bersifat hegemoni dalam memproduksi barang yang mempunyai kualitas serta nilai yang tinggi (Sorensen, 2013, hal. 316).

Tetapi, di tengah kekuatan Amerika Serikat yang selalu menjadi negara hegemoni, Tiongkok telah menjadi salah satu negara yang sangat cepat untuk

mengubah kondisi perekonomiannya untuk menjadi ‘pesaing’ Amerika Serikat dengan lebih membuka diri dalam menjalankan perekonomiannya. Pada permulaan abad ke-21, Tiongkok dengan penduduk banyak di dunia, yaitu sekitar 1,3 Miliar jiwa serta perekonomiannya bertumbuh dalam dekade pertama abad ini dengan rata-rata sekitar 10% pertahun. Tiongkok tengah mencari perannya, baik secara regional maupun global, khususnya dalam bidang ekonomi yang sebelumnya lebih tertutup dan melakukan upaya proteksionisme.

Reformasi Tiongkok merupakan pembaharuan yang direncanakan (*Planned-Change*), yaitu suatu perubahan yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat tersebut (Soekanto, 2012, hal. 272). Tiongkok mempunyai beberapa kebijakan dan strategi untuk melakukan reformasi ekonominya. *Pertama*, pada reformasi Deng Xiaoping menggeser model ‘*top down*’ menjadi sebuah sistem manajemen tidak langsung melalui mekanisme pasar, sekaligus juga mendorong kepemilikan pribadi, kompetisi dan keterbukaan ekonomi. Sehingga, pada awal 1990-an, langkah yang diambil tersebut, menjadikan perekonomian Tiongkok tumbuh sebanyak 14% antara tahun 1992-1997 (Seng, 2007, hal. 71).

*Kedua*, adanya ‘Empat Modernisasi’ yang merupakan sasaran kunci reformasi bagi Tiongkok dengan memfokuskan pada 4 bidang, yaitu: pertanian, industri, sains dan teknologi serta pertahanan nasional (Mittler, 2011, hal. 138). *Ketiga*, ‘Lompatan Besar Ke depan’, yaitu rencana yang sangat ambisius untuk memanfaatkan kekuatan ekonomi sosialis guna meningkatkan produksi Tiongkok atas baja, batu bara dan listrik. Di mana, faktor produksi yang telah dikendalikan oleh Tiongkok, yaitu dengan cara industrialisasi. Salah satunya, yaitu dengan

adanya beberapa barang '*Made In Tiongkok*' yang cukup masif ke beberapa negara lainnya, baik itu secara legal maupun ilegal. Selain itu, Tiongkok juga mempunyai strategi, yaitu '*art of war*', yaitu pengembangan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dan melancarkan pemasaran internasionalnya, yang disebut juga '*5 Is Strategy*' yaitu: *Imitation, Improvements, Improvising, Innovation, Invention* (Widyahartono, 2004, hal. 52).

Sehingga, dengan menerapkan beberapa strategi tersebut, Tiongkok dapat menjalankan perannya dengan baik, khususnya dalam sektor ekonomi secara regional maupun global. Sistem Tiongkok ini dianggap sebagai salah satu sistem dari '*Stalinisme Pasar*', yaitu sistem yang didasarkan pada negara secara kolektif, sehingga dapat membawa seluruh sumber daya ekonomi ke dalam kontrol dari perangkat-perangkat negara (Heywood, 2013, hal. 240).

Menurut *Gross Domestic Product* (GDP), dari tahun 1970 hingga 2014, Tiongkok telah menduduki peringkat kedua setelah Amerika Serikat dan mengungguli negara-negara maju seperti Eropa dan Jepang (BBC, 2015). Dengan perekonomian Tiongkok yang mempunyai peran sentral dalam perekonomian global saat ini, disebabkan karena Tiongkok mempunyai kekuatan struktural, yaitu dengan kendalinya atas jaminan keamanan, produksi, keuangan serta pengetahuan, keyakinan dan gagasan (Blyth, 2009, hal. 21).

Kemudian, setelah Tiongkok merasa telah mendapatkan perannya dengan baik dalam sektor ekonomi, maka Tiongkok juga merasa perlu untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas militernya. Sehingga, beberapa upaya telah dilakukan oleh Tiongkok agar dapat memperoleh peran dalam ranah regional maupun global. Menurut *Stockholm International Peace Research Institute*

(SIPRI) pada tahun 2016, menyatakan bahwa Tiongkok mempunyai anggaran belanja dengan pengeluaran militer tertinggi, sebesar 13%, yaitu dengan menduduki posisi kedua setelah Amerika Serikat dari 15 negara bagian di dunia (SIPRI, 2017). Kemudian, adanya anggaran militer Tiongkok yang semakin meningkat setiap tahunnya, yaitu dari tahun 2008 hingga 2017 (Economics, Trading Economics, 2017). Dan adanya beberapa sektor militer Tiongkok yang lebih unggul dibandingkan Amerika Serikat (Forces, 2016). Oleh karena itu, adanya dominasi Tiongkok saat ini, baik itu dalam sektor militer maupun ekonomi, maka Amerika Serikat sebagai negara hegemoni telah melakukan beberapa upaya untuk mempertahankan hegemoninya agar Tiongkok tidak dapat mengungguli Amerika Serikat.

Sebelum periode Obama, yaitu pada Pemerintahan George W. Bush, Amerika Serikat justru telah melakukan beberapa kebijakan serta upaya yang mendukung Tiongkok agar dapat mempunyai peran yang sangat penting dalam kancan internasional. Hal ini telah dibuktikan dengan pernyataan Bush yang ingin menjalin hubungan yang lebih erat dengan Tiongkok dan ingin mengesampingkan klaim bahwa Tiongkok sebagai ‘pesaing strategis’. Kemudian, ditambah apa telah ditulis oleh Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yaitu: Robert Zoellick, di mana dalam pidato George W. Bush pada tahun 2005, telah menyatakan bahwa:

*“It is time to take our policy beyond opening doors to China’s membership into the international system: We need to urge China to become a responsible stakeholder in that system. China has a responsibility to strengthen the international system that has enabled its success. In doing so, China*

*could...transcend the traditional ways for great powers to emerge” (Sutter, 2013, hal. 8).*

Sehingga, ketika masa pemerintahan George W. Bush, hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok pada saat itu mulai baik dan erat. Tetapi, setelah pemerintahan George W. Bush berakhir dan digantikan oleh Barack Obama, hubungan antara kedua negara ini mulai tegang, salah satunya disebabkan oleh kebijakan yang telah diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap Tiongkok (Sutter, 2013, hal. 8). Beberapa upaya dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Tiongkok bertujuan untuk mencegah dominasi Tiongkok yang telah maju secara pesat sejak awal abad 21.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana upaya pertahanan hegemoni Amerika Serikat menghadapi dominasi Tiongkok dalam sektor ekonomi dan militer pada periode Presiden Barack Obama?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui terkait beberapa upaya Amerika Serikat sebagai negara hegemoni terhadap Tiongkok, di mana saat ini Tiongkok merupakan negara yang mempunyai peran dan pengaruh penting terhadap ekonomi dan militer di dunia.
2. Untuk mengetahui terkait beberapa strategi Amerika Serikat dan seberapa besar keberhasilan Amerika Serikat dalam mempertahankan hegemoninya dalam menghadapi dominasi Tiongkok pada sektor ekonomi dan militer pada periode Presiden Barack Obama.

#### **1.4 Signifikasi**

Fokus dari penulisan ini adalah bagaimana upaya pertahanan hegemoni Amerika Serikat dalam menghadapi dominasi Tiongkok pada periode Presiden Barack Obama. Di mana, penelitian-penelitian sebelumnya hanya membahas terkait hegemoni Amerika Serikat dan pembentukan *Trans Pacific Partnership* (TPP) sebagai salah satu upaya untuk mencegah dominasi Tiongkok dalam sektor ekonomi. Tetapi, beberapa penelitian sebelumnya belum ada yang spesifik membahas terkait konsep hegemoni dari perspektif Antonio Gramsci dengan menganalisis upaya Amerika Serikat dalam menghadapi kebangkitan dan dominasi Tiongkok yang sangat pesat pada periode Presiden Barack Obama.

Oleh karena itu, penulisan ini akan membahas secara spesifik terkait pandangan hegemoni menurut Antonio Gramsci dengan menganalisis upaya pertahanan hegemoni Amerika Serikat pada periode Presiden Barack Obama dalam menghadapi dominasi Tiongkok, dengan memfokuskan pada sektor ekonomi dan militer. Sehingga, diharapkan penulisan ini dapat berkontribusi untuk menambah dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ada.

#### **1.5 Cakupan Penelitian**

Dalam skripsi ini, penulis akan membahas terkait upaya pertahanan hegemoni Amerika Serikat dalam menghadapi dominasi Tiongkok, yaitu dalam sektor ekonomi dan militer pada periode Presiden Barack Obama 2008-2016.

#### **1.6 Kajian Pustaka**

Dominasi perekonomian Tiongkok, dapat dijadikan sebagai peluang dan ancaman bagi Amerika Serikat. Dapat dikatakan sebagai peluang, karena

kerjasama antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah menghasilkan beberapa dampak positif bagi Amerika Serikat, yaitu seperti: membuka banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan *Foreign Direct Investment* (FDI), mengurangi inflasi, menghemat anggaran perdagangan dan dapat meningkatkan *Gross Domestic Product* (GDP) (USBC, 2017, hal. 4-5). Tetapi, di salah satu sisi, hubungan kerjasama Amerika Serikat dengan Tiongkok telah menjadi ancaman bagi Amerika karena hegemoni Amerika Serikat akan menjadi berkurang karena kebangkitan Tiongkok pada awal abad 21 (Heywood, 2013, hal. 757).

Pada abad ke 21 saat ini, Amerika Serikat dan Tiongkok mempunyai peran yang sangat penting dalam menyelesaikan beberapa permasalahan di dunia ini, baik itu dalam bidang politik, militer, keamanan, ekonomi (Maurice R. Greenberg, 2009). Sehingga, Amerika Serikat saat ini telah mengalami sebuah dilema, yang mana di salah satu sisi Amerika Serikat memerlukan Tiongkok dan di sisi lainnya, Amerika Serikat tetap ingin mengendalikan Tiongkok agar tetap menjadi negara hegemon. Sehingga, fokus penelitian ini akan membahas terkait upaya pertahanan hegemoni Amerika Serikat dalam menghadapi dominasi Tiongkok pada periode Presiden Barack Obama. Oleh karena itu, dalam tinjauan pustaka ini, penulis akan mencoba mengambil beberapa tulisan yang telah menganalisis terkait dilema Amerika Serikat terhadap Tiongkok, beberapa upaya Amerika Serikat dalam mempertahankan sistem hegemoninya serta relevansi hegemoni Amerika Serikat saat ini.

**a) Dilema Hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok**

*Pertama*, terkait dilema Amerika Serikat terhadap Tiongkok, di mana terdapat sebuah pandangan dari jurnal yang berjudul "*The Future of U.S-China*

*Relations: Is Conflict Inevitable?*”, yang telah ditulis oleh Aaron L. Friedberg. Penulis berpendapat terkait hubungan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok dari beberapa sudut pandang. Dalam jurnal ini terdapat perdebatan terkait peluang dan ancaman bagi Amerika Serikat dalam menjalin hubungannya dengan Tiongkok. Di salah satu sisi, terdapat peluang dengan adanya interdependensi ekonomi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, sehingga hubungan ini dapat menciptakan sebuah hubungan mutualisme yang saling menguntungkan, khususnya bagi Amerika Serikat. Oleh karena itu, hal ini akan membuat hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok akan selalu damai tanpa adanya perang maupun konflik di masa depan. Tetapi, di salah satu sisi dapat dikatakan sebagai ancaman, di mana kebangkitan Tiongkok dari abad 20 hingga saat ini mempunyai strategi yang dikhawatirkan akan lebih kreatif dan inovatif di masa depan, sehingga akan dapat menyaingi hegemoni Amerika Serikat (Friedberg, 2005, hal. 12-21).

*Kedua*, pada sebuah laporan yang berjudul *“Understanding the US-China Trade Relationship”*, yang telah ditulis oleh *The US-China Business Council* (USBC) pada tahun 2017. Pada laporan ini menyatakan bahwa Amerika Serikat masih membutuhkan Tiongkok karena Amerika Serikat mendapatkan banyak keuntungan dari Tiongkok, khususnya dalam bidang ekonomi, yaitu perdagangan bilateral antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah memberikan banyak manfaat bagi Amerika Serikat, khususnya pada tahun 2015. Beberapa manfaat tersebut, yaitu: *Pertama*, memperluas lapangan pekerjaan sebanyak 2,6 juta di beberapa industri yang telah dibentuk oleh Tiongkok di Amerika Serikat, sehingga dapat meningkatkan *Gross Domestic Product* (GDP) Amerika Serikat hingga mencapai

\$216 Miliar. *Kedua*, memperoleh keuntungan sebanyak \$56.500 dan dapat menghemat anggaran perdagangan sebanyak \$850 karena impor Tiongkok terhadap Amerika Serikat yang murah. *Ketiga*, memperoleh keuntungan nilai ekspor yang dijual oleh Amerika Serikat terhadap Tiongkok sebanyak \$165 Miliar. *Keempat*, meningkatkan *Foreign Direct Investment* (FDI) Amerika Serikat dari \$10 Juta pada tahun 2014 dan meningkat sebanyak \$14,8 Juta pada tahun 2015 (USBC, 2017, hal. 4-5).

#### **b) Upaya Pertahanan Hegemoni AS**

*Pertama*, terkait upaya pertahanan Amerika Serikat dalam menjaga sistem hegemoninya, di mana terdapat sebuah pandangan dari buku yang berjudul “*Asian Strategic Review 2014: US Pivot and Asia Security*” yang telah ditulis oleh S D Muni dan Vivek Chadha. Penulis berpendapat bahwa terdapat upaya yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat dalam mempertahankan hegemoninya ketika Barack Obama menjadi Presiden yaitu dengan menerapkan ‘*Pivot Asia*’ atau ‘*Rebalancing Asia*’. Di mana, ‘*Pivot Asia*’ atau ‘*Rebalancing Asia*’ merupakan kebijakan untuk meningkatkan pengaruh ekonomi, politik, khususnya keamanan, yang dapat dilakukan membentuk kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik (Chadha, 2014).

*Kedua*, terdapat sebuah upaya yang juga telah dilakukan oleh Presiden Barack Obama pada masa pemerintahannya agar dapat mempertahankan hegemoni Amerika Serikat. Hal ini telah disebutkan dalam buku yang berjudul “*US Foreign Policy*” (*Second Edition*) yang telah ditulis oleh Michael Cox dan Doug Stokes. Penulis berpendapat bahwa Obama dianggap telah berhasil menerapkan *Smart power*. *Smart power* adalah gabungan atau kombinasi antara

*hard power* dan *soft power*. Di mana, strategi yang paling penting untuk digunakan dalam *smart power* adalah memanfaatkan *information age* saat ini, yaitu dengan mempunyai komponen informasi serta komunikasi. Sehingga, dengan implementasi *smart power* ini, maka Amerika Serikat pada periode Barack Obama telah dapat mempertahankan hegemoninya, khususnya dalam lingkup internasional (Stokes, 2012, hal. 97-106).

Hal ini terbukti dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat ketika krisis ekonomi 2008, di mana Amerika Serikat justru mengubah kelompok aliansi *Group of Eight* (G-8) yang membahas terkait ekonomi dan politik. Presiden Barack Obama telah mengubah kebijakan luar negerinya, yang mana sebelumnya kerjasama ekonomi dan politik ini hanya dilakukan dengan anggota negara *Group of Eight* (G-8), yaitu beberapa anggota negara maju saja. Kemudian, aliansi *Group of Eight* (G-8) ini telah diubah dengan *Group of Twenty* (G-20) yang didalamnya tidak hanya negara maju saja, tetapi juga terdapat beberapa negara berkembang, salah satunya Tiongkok yang saat itu tengah mulai pada fase kebangkitan ekonominya. Sehingga, diharapkan dengan adanya sebuah asosiasi *Group of Twenty* (G-20) ini, maka beberapa negara maju dan berkembang dapat membahas berbagai kebijakan serta menjalin sebuah kerjasama yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, khususnya dalam perekonomian global (Stokes, 2012, hal. 97-106).

### c) **Relevansi Hegemoni AS Saat Ini**

*Pertama*, terkait relevansi hegemoni Amerika saat ini, yang mana terdapat sebuah pandangan dari buku berjudul *Politik (Edisi Keempat)* dan telah ditulis oleh Andrew Heywood. Penulis ini berpendapat bahwa saat ini telah terdapat

redistribusi kekuasaan secara global, di mana yang sebelumnya unipolaritas, sekarang menjadi multipolaritas. Unipolaritas merupakan sebuah tatanan internasional yang hanya mempunyai satu sentral kekuatan dan biasanya dikuasai oleh suatu negara yang mempunyai otoritas dan peran yang paling besar dalam bidang ekonomi, politik maupun militer (Heywood, 2013, hal. 750). Dan sebaliknya, apabila multipolaritas merupakan sebuah tatanan internasional yang mempunyai lebih dari satu sentral kekuatan dan biasanya juga dikuasai oleh suatu negara yang mempunyai otoritas dan peran yang paling besar (Heywood, 2013, hal. 756).

Kemudian, penulis juga mempunyai alasan terkait mengapa saat ini sistem menjadi lebih cenderung multipolaritas. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu: *Pertama*, adanya degenerasi Amerika Serikat, di mana saat ini pengaruhnya tidak sekuat seperti dahulu. *Kedua*, adanya transisi sistem dan hubungan kekuasaan, di mana saat ini telah memasuki era globalisasi yang tidak mengharuskan peran negara selalu ikut campur dalam hal ekonomi, tetapi juga bisa ditangani oleh aktor non-negara. *Ketiga*, bangkitnya perekonomian Tiongkok yang sangat pesat, sehingga dapat memunculkan kekuatan dan kekuasaan baru dalam perekonomian global saat ini (Heywood, 2013, hal. 756-757).

*Kedua*, pada sebuah laporan berjudul **“China’s Growing Interest in Latin America”** yang telah ditulis oleh Kerry Dumbaugh dan Mark P. Sullivan. Penulis berargumen bahwa kontribusi Tiongkok di wilayah Amerika Latin dapat menjadikan ancaman bagi ekonomi Amerika Serikat di masa depan. Hubungan antara Amerika Latin dan Tiongkok telah memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak, khususnya Amerika Latin. Di mana, Tiongkok telah menjadi negara

lima besar yang mengimpor barang ke Amerika Latin. Hal ini terbukti bahwa beberapa negara Amerika Latin telah mengimpor beberapa barang dari Tiongkok, yaitu seperti: Brazil sebanyak \$8,7 Miliar, Chili sebanyak \$3,7 Miliar, Argentina sebanyak \$3,3 Miliar, Meksiko sebanyak \$2,1 Miliar serta Peru sebanyak \$1,5 Miliar (Sullivan, 2005, hal. 1-7). Kemudian, pada tahun 2013, volume perdagangan antara Amerika Latin dan Tiongkok menjadi semakin meningkat, yang sebelumnya hanya \$12 Miliar menjadi \$275 Miliar (Reid, 2015).

Selain itu, Tiongkok juga telah banyak menanamkan *Foreign Direct Investment* (FDI) ke beberapa negara Amerika Latin, seperti: Brazil, Argentina, Meksiko, Chile, Venezuela dan Peru. Sehingga, meningkatnya hubungan kerjasama ekonomi antara kedua negara ini dapat mengancam kepentingan dan otoritas Amerika Serikat di wilayah Amerika Latin. Tiongkok juga telah menggunakan Amerika Latin sebagai alat untuk melawan dominasi Amerika Serikat serta membentuk aliansi negara dunia ketiga dari beberapa negara di Amerika Latin yang bertentangan dengan nilai dan kepentingan Amerika Serikat (Sullivan, 2005, hal. 1-7).

*Ketiga*, pada tulisan jurnal berjudul “*An End to U.S. Hegemony? The Strategic Implications of China's Growing Presence in Latin America*” yang telah ditulis oleh Francisco De Santibañes berargumen bahwa hegemoni Amerika Serikat saat ini telah menurun, salah satu contohnya adalah pengaruh ekonomi dan politik Amerika Serikat di Amerika Latin yang telah digantikan oleh Tiongkok sebagai negara ‘saingan’ Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat kurang memperhatikan Amerika Latin, sehingga dengan adanya kebangkitan Tiongkok menjadikan Amerika Latin beralih kepada Tiongkok yang dirasa lebih

menguntungkan. Selain itu, Tiongkok juga telah mengalami pertumbuhan ekonomi secara ekstrem, di mana hingga saat ini Tiongkok telah mempunyai peran yang sangat besar dalam perekonomian global (Santibañes, 2009, hal. 17-21).

### **1.7 Perspektif Teori / Konsep**

Dalam skripsi ini, penulis akan menggunakan konsep hegemoni. Konsep hegemoni berasal dari Bahasa Yunani, yang biasa disebut dengan *'eugemonia'* dan mempunyai arti pemimpin. Konsep ini diprakarsai oleh Antonio Gramsci yang mempunyai dominasi dari salah satu elemen dalam sebuah sistem atas elemen-elemen yang lainnya. Di mana, konsep ini dapat menentukan kapabilitas dari sebuah kelas yang paling berkuasa atau berpengaruh dalam menjalankan dan mengatur kekuasaan yang bersifat non-koersif dengan menyebarkan nilai-nilai borjuis ke seluruh masyarakat. Implementasi hegemoni ini bertujuan untuk memperlihatkan seberapa besar peran dan posisi oleh sebuah negara terhadap negara-negara lainnya (Patria & Arief, 2015, hal. 115-118).

Kemudian, konsep hegemoni menurut Antonio Gramsci telah disebutkan dalam pernyataannya sebagai berikut:

*"... dominant groups in society, including fundamentally but not exclusively the ruling class, maintain their dominance by securing the 'spontaneous consent' of subordinate groups, including the working class, through the negotiated construction of a political and ideological consensus which incorporates both dominant and dominated groups." (Strinati, 1995: 165) (Arora, 2016)*

Konsep hegemoni juga bisa diartikan sebagai sebuah kekuatan yang paling besar atau dominan yang dapat mempengaruhi dan mengendalikan beberapa aspek kekuatan global. Sehingga, konsep hegemoni ini dapat ditemukan pada Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat telah mempunyai kekuasaan secara global di dunia ini. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu: *Pertama*, militer, di mana kekuatan militer Amerika Serikat sangat kuat, sehingga akan membuat sebuah negara dapat mengamankan dan mempertahankan wilayah dan masyarakatnya dari invasi asing serta membuat Amerika Serikat semakin mudah untuk melakukan ekspansi agar bisa mencapai *international interest* mereka (Heywood, 2013, hal. 755-757).

*Kedua*, ekonomi, di mana hingga saat ini mata uang Dollar Amerika Serikat masih digunakan sebagai alat pertukaran internasional. Kemudian, peringkat ekonomi Amerika Serikat masih menduduki nomor satu di dunia. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat memiliki kekuatan *soft power*, di mana Amerika Serikat telah berhasil untuk memadukan kekuatan militer dan ekonomi. Perpaduan tersebut dapat disebut sebagai ‘kekuatan ko-optif’, yaitu mempengaruhi dan mengontrol orang lain dengan cara persuasif tanpa menggunakan koersif (Heywood, 2013, hal. 755-757).

Menurut Antonio Gramsci, di dalam konsep hegemoni terdapat supremasi kelas, di mana supremasi kelas ini terdapat dua konsep, yaitu: kepemimpinan secara langsung dan juga dominasi (Gramsci, 1999, hal. 212-213). Kedua konsep ini mengimplikasikan tiga hal, yaitu: *Pertama*, kekuasaan dan dominasi suatu negara, baik itu terhadap relasi maupun musuhnya. *Kedua*, suatu kekuasaan yang harus dijalankan untuk menaklukkan pemerintahan. *Ketiga*, kekuasaan suatu negara

dapat dijalankan melalui kepemimpinan serta dominasi yang terus berlanjut (Patria & Arief, 2015, hal. 117-118).

Menurut Antonio Gramsci, hegemoni juga dapat diperoleh dari kelas sosial, sehingga akan menciptakan adanya supremasi atau keunggulan dengan dua cara, yaitu: *Pertama*, paksaan atau dominasi, yang berarti bahwa negara tersebut mempunyai kendali serta pengaruh yang sangat besar terhadap negara-negara lainnya. *Kedua*, kepemimpinan moral dan intelektual (Gramsci, 1999, hal. 212-213). Kepemimpinan moral dan intelektual ini dapat diartikan sebagai sebuah negara yang harus mempunyai kapasitas dalam mengelola dan dapat menjadi 'organisator' dengan baik agar dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya (Gramsci, 2013, hal. 7-8).

Konsep hegemoni Antonio Gramsci ini telah dikutip oleh Joseph V. Femia dalam bukunya yang berjudul: *Gramsci's Political Thought: Hegemony, Consciousness, and the Revolutionary Process*. Di mana, Joseph V. Femia menjelaskan dan membagi hegemoni ini menjadi 3 jenis berdasarkan kekuatan serta kapabilitasnya masing-masing (Femia, 1981, hal. 46-47).

*Pertama*, hegemoni total (*integral hegemony*), yaitu jenis hegemoni yang kuat, keadaan di mana masyarakat bersatu dengan moral dan intelektual yang kuat. *Kedua*, hegemoni yang berkurang (*decadent hegemony*), yaitu jenis hegemoni yang mulai memudar. Hal ini disebabkan karena kondisi perekonomian sedang mengalami tantangan yang berat karena terdapat disintegrasi. *Ketiga*, hegemoni minimum (*minimal hegemony*), yaitu jenis hegemoni yang paling rendah, keadaan di mana tidak adanya persatuan yang kuat di dalamnya serta

banyaknya kesenjangan dan pertentangan yang tidak bisa terorganisir dengan baik (Femia, 1981, hal. 46-47).

Sehingga, dalam skripsi ini, penulis akan menganalisis upaya pertahanan hegemoni Amerika Serikat dalam menghadapi dominasi Tiongkok dari aspek militer dan ekonomi. Upaya pertahanan Amerika Serikat dapat dianggap hegemoni total (*integral hegemony*), apabila kedua cara untuk memperoleh hegemoni, yaitu dominasi serta kepemimpinan moral dan intelektual semakin kuat. Begitu juga sebaliknya, upaya pertahanan Amerika Serikat dikatakan hegemoni yang berkurang (*decadent hegemony*), apabila dominasi serta kepemimpinan moral dan intelektualnya semakin melemah (Gramsci, 1999, hal. 212-213).

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Metode Kualitatif**

Penulisan ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu sebuah metode yang dapat dikategorikan untuk mengetahui dan memahami berbagai perspektif dan dimensi dari sebuah kehidupan sosial. Sehingga, hasil dari metode kualitatif ini berupa sebuah analisis yang diuraikan dan dijelaskan dengan kata-kata. Kemudian, metode ini juga cocok digunakan untuk beberapa pertanyaan penelitian, salah satunya yaitu ‘bagaimana’ (Cochran, 2007, hal. 2-3). Sehingga, metode kualitatif ini sangat sesuai dengan pertanyaan penelitian penulis, yaitu:

*“Bagaimana upaya pertahanan hegemoni Amerika Serikat dalam menghadapi dominasi Tiongkok pada sektor ekonomi dan militer pada periode Presiden Barack Obama?”*

Dengan menggunakan metode kualitatif ini, penulis dapat memberikan beberapa pemaparan dan penjelasan terhadap suatu objek secara rinci. Kemudian, hasil dari metode kualitatif ini dapat mengarah dan menghasilkan sebuah pengembangan konsep, interpretasi, saran, solusi atau evaluasi dari isu yang telah dibahas oleh penulis. Dan pada bagian akhir, penulis akan mengambil sebuah kesimpulan sebagai hasil dan intisari dari penelitian ini (Beverley Hancock, 2009, hal. 6-7).

### **1.8.2 Teknik Pengambilan Data**

Dalam penulisan ini akan menggunakan teknik pengambilan Data Sekunder, di mana data akan didapatkan melalui tinjauan pustaka, yaitu melakukan proses pencarian data-data yang telah diolah dengan melakukan pengamatan, perbandingan serta mengambil beberapa referensi atau sumber yang sudah ada, seperti buku, data, jurnal dan artikel melalui internet. Sehingga, dalam penelitian ini akan dibahas secara detail dengan melakukan peninjauan dari beberapa data yang terpercaya melalui internet (Cochran, 2007, hal. 21).